



Potret Konstruksi Pendidikan Karakter: Kajian pada Lembaga Pendidikan di Jawa Barat

Dindin Jamaluddin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Abstrak

Madrasah dalam khazanah peradaban Islam pada awalnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas keimanan-keislaman. Hal ini ditujukan sebagai bentuk dari keinginan untuk mempertahankan Islam, dan itu berimbas pada tipologi madrasah di Indonesia. Keberadaan madrasah yang berfungsi untuk meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui pembentukan karakter agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat di sekitarnya. Terminolog pesantren dan madrasah mendapatkan posisi yang berbarengan. Untuk itu, akan dipaparkan lembaga pendidikan Islam di Jawa Barat yang secara konsisten menanamkan karakter –dalam konteks Indonesia- pada santrinya. Pendidikan di Pesantren menandakan bahwa perilaku atau tingkah laku yang diimplementasikan para ulama lebih menarik bagi para calon santri, atau bahkan ekpektasi untuk menjadi seperti mereka adalah asa yang tinggi di dalam diri calon santri. Artinya pembentukan akhlak atau karakter memang dimulai dari figur atau pimpinan lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah) di Indonesia, Jawa Barat khususnya, niat untuk menggulirkan gagasan tersebut bukan hanya kamuflase survival semata tetapi menjiwai seluk beluk yang berkaitan dengan pembinaan karakter (akhlak).

Kata Kunci: Potret, Konstruksi, Karakter, Pesantren, Madrasah

1 Pendahuluan

Memperbincangkan madrasah kerap kali disandingkan dengan Madrasah Nidzamiyah di Baghdad. Lembaga pendidikan tersebut menjadi *prototype* madrasah di dunia muslim. Kemasyhuran Madrasah Nidzamiyah telah diakui oleh peradaban dunia, karena –disamping faktor lainnya- keberpihakan penentu kebijakan (pemerintah) terhadap peningkatan dan pengembangan lembaga tersebut sangat signifikan. Secara tidak langsung, langkah-langkah tersebut membentuk Madrasah Nidzamiyah menjadi bagian penting dari peradaban dunia pendidikan -Islam khususnya-.

Keberpihakan terhadap dunia pendidikan, memberikan arti penting terhadap peradaban manusia. Telah banyak dibuktikan, bahwa kualitas kesejarahan umat atau manusia akan ditentukan oleh sejauhmana pendidikan memberikan nilai keberhasilan pendidikan dalam sejarah manusia itu

sendiri. Maka, tidak mengherankan, jika tingginya peradaban di belahan bumi ini, ditentukan oleh sejauhmana *political will* serta *concern* terhadap pendidikan.¹

Berdasar pada penelitian terakhir dari Hasan Ibrahim Hasan dan Richard Bulliet, disampaikan bahwa Madrasah Nidzamiyah bukanlah Madrasah yang pertama kali hadir dalam lembaran sejarah pendidikan Islam. Di belahan dunia lain, khususnya di Nisyapur, India telah banyak berkembang lembaga pendidikan dengan istilah madrasah, salah satunya adalah Madrasah Bayhaqiyyah.² Hasil penelitian tersebut, tidak saja memberikan nuansa baru dalam perbincangan tentang madrasah. Lebih dari itu, akan memulai kajian-kajian baru yang lebih mendalam mengenai madrasah itu sendiri.

Mengenai hal tersebut, Azra mengusulkan harus ada kajian lain tentang madrasah. Asalnya pembahasan mengenai madrasah masih berkuat pada deskripsi dan uraian yang cenderung ensiklopedik dan naratif. Yakni lebih banyak menggambarkan hal ihwal yang berkaitan dengan data-data semata. Selanjutnya, perlu digunakan pendekatan baru yang lebih luas, analitik dan interpretatif. Pendekatan itulah yang Azra sebut sebagai pendekatan sejarah sosial pendidikan Islam. Dengan pendekatan ini, yang dibahas tidak hanya entitas madrasah semata. Lebih dari itu, hal ihwal yang berkaitan erat baik langsung maupun tidak langsung perlu menjadi entri point penelitian tentang madrasah.

Sejarah madrasah mengalami perkembangannya yang sangat dinamis. Awalnya, dalam lingkup pendidikan di Indonesia yang “masih” dua atap. Tanggung jawab madrasah memang terasa berat. Satu sisi ia harus menjadi bagian dari pendidikan keagamaan yang merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, yang eksistensinya disebutkan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 1989: "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan". Bahkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditetapkan juga sebagai pelaksana program wajib belajar setingkat SD/SLTP, sedangkan Madrasah Aliyah (MA) sebagai SMU. Dan di sisi lain, madrasah juga berfungsi sebagai pelaksana pendidikan dasar dan menengah umum, yang berarti harus mengajarkan bahan kajian sama dengan sekolah umum. Hal itu dimulai sejak adanya SKB 3 Menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975. Kemudian SKB ini dikuatkan lagi dengan PP No 28 tahun 1990, SK Mendikbud No 0487/U/1992 dan No 054/U/1993. SK-SK ini ditindaklanjuti dengan SK Menag No 368 dan 369 tentang penyelenggaraan MI dan MTs.

Pendeknya, tujuan yang dihadapi oleh madrasah seperti menjemput “impian”. Tidak saja bagaimana mempertemukan “dua” kutub yang selama ini berada pada tempatnya masing-masing, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Hal yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berkarakter. Pertanyaan retorik dari Azra adalah, apakah asa itu realistis dan *visible* bagi madrasah?

¹ Dalam ikhtisar pembabakan sejarah yang diungkapkan oleh Michael H. Hart dalam *Seratus Tokoh Berpengaruh*, hal. 19-26, dijelaskan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa ditentukan dengan melek huruf dari pujangganya. Dicatat dalam buku tersebut, bahwa bangsa Sumeria dianggap sebagai titik awal peradaban, karena kemampuan mereka dalam mengenal tulisan. Begitupun tahapan selanjutnya, abjad pertama yang dikenal adalah kode Hammurabi, dan apalagi pasca renaissance, yakni sekitar tahun 1300-an, pendidikan menjadi faktor penting bagi peradaban dunia, dengan ditemukannya teknologi sebagai hasil dari pendidikan.

² Azyumardi Azra, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 1999, hlm ix

Keberadaan madrasah tidak dapat dipisahkan dari pesantren. Maka memisahkan madrasah dari pesantren sebagai bagian dari khazanah peradaban pendidikan Islam di Indonesia menjadi tidak kontekstual. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pesantren. Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad, Nurcholis Madjid menyebutkan,³ bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (indigenous) Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi.

Untuk meringkas bahasan tentang pesantren yang dikaitkan dengan judul makalah ini, penulis kutip pernyataan dari Ketua PB NU Said Aqil Siradj,⁴ yakni: Dengan pola kehidupannya yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Dalam jangka panjang, pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat di sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri mengorbankan identitas dirinya. Pola pertumbuhan di hampir setiap pesantren menunjukkan gejala kemampuan melakukan perubahan total itu.

Kebebasan relatif pondok pesantren dari intervensi eksternal dalam skala besar telah memberikan ruang untuk melakukan transformasi yang dibutuhkan bagi eksperimentasi dengan ide-ide dan gagasan para pemikir. Kebebasan relatif hasil dari keterampilan pesantren untuk merespons metode konstruktif dari tantangan eksternal seperti sistem sekolah Barat, adalah situasi otonomi yang diberikan oleh pesantren dan cukup fleksibel dalam rangka memelopori konsep pendidikan baru. Dalam perspektif kebudayaan, melaksanakan peraturan pelengkap dengan kesadaran ideologis memberikan landasan kuat untuk transformasi sosial yang fundamental dan dibutuhkan oleh negara di masa depan.

2 Pesantren Dan Transformasi Sosial

Ilmu pengetahuan di era globalisasi memiliki dampak psikologis pada peran pesantren di bumi Nusantara ini. Problem kontemporer yang melanda kehidupan yang dewasa ini menjadi tantangan tersendiri bagi kerja dan fungsi pondok pesantren di tengah kecenderungan perkembangan masyarakat ke arah “masyarakat serba nilai”, yaitu berkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat yang timbul akibat proses modernisasi itu sendiri. Dampak perubahan yang sedang berjalan diiringi dengan respons terhadap perubahan yang menunjukkan perbedaan. Sesungguhnya, respons yang ditunjukkan oleh Pondok Pesantren sebuah indikator adanya potensi untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Karena itu, secara esensial Pesantren memiliki daya adaptasi daya tahan yang dapat dijadikan pangkal tolak untuk menumbuhkan daya dorong di dalam daya proses *social engineering*, agar ia berkembang dan memberikan sumbangan dan peranannya di dalam proses pembangunan masyarakat yang lebih bermakna.

Fenomena Pesantren⁵ berhasil mengangkat “isu transformasi social” ke permukaan dengan daya pikat tersendiri. Pesantren memiliki ciri kontekstual tersebut adalah: orientasi kuat pada kyai,

³ *Bilik-Bilik Pesantren* (Paramadina-Jakarta, 1997)

⁴ *Pesantren dan Civil Values*, R epublika.

⁵ Tipologi pesantren secara garis besar dapat dikategorikan pada dua kategori besar: *pertama*, Pesantren Salafi yang masih mempertahankan ciri khas yaitu peng kajian kitab kuning/ klasik. System

wawasan terbatas, deferensiasi dan spesialisasi tidak berkembang adalah warna-warna kontekstual yang terserap oleh Pesantren. Dengan kata lain, Pesantren menyimpan potensi problem yaitu tidak adanya keseimbangan antara aspek-aspek spiritual dan kecenderungan mengingkari kehidupan duniawi.

Fenomena pesantren dimana kyai menjadi puncak otoritasnya, dan melalui program pengembangan masyarakatnya yang dirintis sejak dasawarsa terakhir ini, tampaknya bukan fenomena social yang layak diabaikan. Fenomena semacam itu menarik untuk diperbincangkan. Secara ideal Pesantren harus mampu memobilisasi perubahan yang memiliki relevansi tinggi bagi kebutuhan masyarakat untuk mengangkat citra, derajat dan martabat rakyat kecil. Peran serta kyai dalam transformasi dan rekayasa social di masyarakat sanggup membangun sikap emansipatoris wong cilik, menanamkan watak progresif bagi santri serta menggerakkan gelombang kesadaran rakyat jelata untuk terlibat aktif bagi perubahan social.⁶

Secara Sosiologis peran pesantren mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sebab dalam kesadaran intern umat Islam, label Islam agaknya masih dilihat secara umum, sehingga memberi makna Sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Namun demikian, kenyataan Sosiologis di tanah air Pesantren dari tahun ke tahun menampakkan pergeseran peran di masyarakat. Pada era kemerdekaan, pondok pesantren ikut memberikan andil yang begitu besar dalam menyulut obor Nasionalisme yang berakhir dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan. Jumlah pondok pesantren bukan semakin menyusut, tetapi semakin bertambah dan berkembang biak. Kuantitas pesantren dalam perkembangan terakhir dari segi perannya masih terbatas pada wawasan keagamaan belum masuk pada wawasan kebangsaan. Dengan demikian, problematika pesantren di atas bukan persoalan baru dan ringan, tetapi Pesantren membutuhkan pemikiran alternative untuk membebaskan dari keterbelengguan hanya pada wawasan keagamaan.

Untuk mengurai problematika sebagaimana dijelaskan di atas, maka dibutuhkan analisis model SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, Treats*). Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan agama dan lembaga social kemasyarakatan dengan system asrama pada umumnya bersifat tradisional. Pondok pesantren berperan dan memberi warna yang khas dalam wajah masyarakat. Kekhasan Pesantren dalam organisasi ditunjang oleh komponen-komponen pesantren, yaitu Kyai, santri, masjid, asrama dan kitab kuning. Dengan demikian, kita mencoba untuk meneropong panorama kehidupan Pondok Pesantren yang dapat dipotret menunjukkan realitas: *pertama*, Kyai merupakan personifikasi dalam system nilai yang kedudukan sosialnya cukup kokoh karena charisma spiritual berperan sebagai (*cultural broker*) menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Ia berperan sepenuhnya karena ia sebagai *Innovative leader* dan *opinion leader*, yang mengerti bahwa perubahan social adalah perkembangan yang tak terelakkan lagi. Kyai mengupayakan

madrasah diterapkan untuk memudahkan system sorogan yang dipakai pada lembaga-lembaga pengkajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengetahuan umum. *Kedua*, Pesantren Khalafi, system pendidikan yang adaptif dengan pengetahuan umum atau membuka sekolah umum dalam lingkungan pesantren contoh: Gontor, Tebuireng, dan Rejoso di Jombang.

⁶ Kajian kritis Hiroko Hirokoshi yang menampilkan sosok agama tokoh agama Kyai Yusuf Tajiri dari Cipari Garut, Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan Kyai berperan kreatif dalam perubahan social, bukan karena sanga Kyai mencoba meredam akibat perubahan yang terjadi, melainkan justru karena memelopori perubahan social dengan caranya sendiri. Hiroko Horikosi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987). Bandingkan dengan Zamakhsyari Dofier dalam merintis kajian tentang pesantren dari sudut tradisi keilmuannya, dan Sidney Jones yang menelusuri pola-pola hubungan Sosiologis pesantren.

perubahan itu sebagai kebutuhan dan sekaligus memenuhinya, tanpa harus merusak ikatan-ikatan social yang telah ada sebagai mekanisme perubahan social yang diinginkan. *Kedua*, santri. Santri adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan terpelajar, dimana segala tindakan dan perbuatannya didasarkan pada ibadah yaitu keikhlasan yang merupakan ciri dan kekuatan budaya sebagai budaya transendensi. Peran santri sangat strategis baik dalam penataan ke dalam maupun penataan ke luar sebagai agen perubahan di masyarakat. *Ketiga*, masjid. Masjid merupakan ciri penting eksistensi pesantren, sebagai symbol keutuhan budaya dan menjadi pusat aktivitas kepesantrenan. *Keempat*, kitab kuning. Kitab kuning menjadi symbol kekuatan intelektual komunitas pesantren yang dengan tegas mempersiapkan santri-santrinya menjadi ulama. *Kelima*, asrama. Asrama sebagai bagian penting tradisi pesantren dan pembeda dengan system pendidikan lainnya.

Sementara problem pesantren secara factual tergambar dari cara pandang (*world view*) komunitas pesantren yang terangkum dalam empat problem: *pertama*, pandangan *a historis* terhadap ajaran Kitab Suci dan Sunah Rasul, yang sesungguhnya menyediakan bahan-bahan yang berharga bagi yang berkomitmen kepada usaha perbaikan kehidupan kelembagaan. Bahan-bahan itu tidak diapresiasi secara optimal, padahal bahan-bahan tersebut dapat menguatkan harapan dan cita-cita serta keyakinan bahwa suatu bentuk sumbangan tertentu dapat diberikan pesantren kepada kemanusiaan untuk menghadapi tantangan zaman. *Kedua*, peranan kyai sebagai *cultural broker* menciptakan keterpusatan pola kepemimpinan kyai yang memegang otoritas sebagai alat penyaring arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak. Namun, menurut Clifford Geertz bahwa peranan penyaring itu akan macet ketika arus informasi itu masuk begitu deras dan tidak lagi disaring oleh kyai. Dalam keadaan begitu, kyai akan kehilangan peranannya dalam perubahan social, implikasinya, peranannya yang sekunder dan tidak kreatif itu akan mengalami kesenjangan budaya dengan masyarakat, sehingga peranan kyai menjadi marjinal dan subordinasi dari peran yang sesungguhnya. Hal ini menjadi titik lemah kemajuan institusi dan melemahkan kerinduan untuk membangun moralitas masyarakat, serta menyebabkan perkembangan pesantren mandek dan kehilangan eksistensi (*facticity*). *Ketiga*, Profesionalisme yang mentradisi. Perkembangan sebuah institusi sangat tergantung pada kerja ilmiah dan sosialisasi ke masyarakat serta aplikasinya bagi masyarakat (*trickle effect down*) yang tidak menetas ke umat. Budaya kepesantrenan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk mentali profesionalitas. Keempat, pemahaman keagamaan yang sempit terbingkai dalam budaya konservatif dengan segenap atribut dan symbol ketinggian nilai dan moralitas, menyeret pada kesenjangan religiusitas antara situasi elitis pemahaman (*fiqh*) dihadapkan dalam keawaman pemahaman masyarakat. Situasi itu menjadi warisan yang tentu tidak kondusif untuk membawa pesantren kearah perubahan yang mendasar di tengah kehidupan yang progresif dan modern.

Masa depan Pesantren adalah bagian dari masa depan bangsa yang tergantung pada unsur-unsur pendukung. Salah satu unsur penting pendukung dalam proses perkembangan bangsa adalah pesantren yang selama ratusan tahun telah mengambil peran yang dominan dalam proses kehidupan berbangsa.

Pada dimensi lain, secara inhern ditemukan indikator peluang bagi pengembangan pesantren berdasarkan asumsi di atas, yaitu nilai-nilai secara *taken for granted* oleh: *pertama*, potensi-potensi fundamental mental intelektual (nafsani, aql), mental spiritual (ruhani), dan fisik (jasmani) yang dapat ditumbuh kembangkan. Dari trilogy potensi ini dapat diaktualisasikan pada bentuk ijtihad, mujahadah dan jihad sebagai pola kerja penuh minat, semangat dan dedikasi untuk mentransformasikan nilai-nilai kebenaran pada masyarakat. *Kedua*, terbukanya kesempatan untuk mendialogkan budaya homogenitas pesantren dengan realitas heterogenitas masyarakat. *Ketiga*,

pluralitas budaya semakin menyadarkan diri komunitas Pesantren, untuk mengajarkan secara wajar dan dinamis dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara secara fakta social, pesantren belum menunjukkan perubahan dan perkembangan yang signifikan. Karena itu, tidak sedikit kritik dan evaluasi yang melahirkan stigma negative terhadap kinerja Pesantren. Dari serangkaian perjalanan sejarah Pesantren yang terjadi, setidaknya membutuhkan upaya kreatif dan cerdas untuk menciptakan rancang bangun (*plat form*) yang sinergis diikuti oleh konsep-konsep konstruktif dan dukungan semua pihak.

Untuk suatu cita-cita, gagasan pasti ada tantangan, tantangan tidak berarti dihindari tetapi untuk diatasi secara cepat dan tepat. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mendinamisasi diri baik secara individu maupun kolektif-institusi dengan media trilogy potensi di atas untuk menyesuaikan dan memberbaharui dirinya secara terus-menerus dalam rangka mengataasi perubahan-perubahan tersebut. Keberhasilan mengatasi perubahan yang kompetitif secara khusus tergantung kepada adanya jiwa kepemimpinan, profesionalisme dan modernisasi institusi, dengan mempertimbangkan gaya berfikir universal dan substansial.

Tawaran paradigma Pesantren yang mungkin bisa dikemukakan adalah: pertama, bagaimana mernggeser paradig kepemimpinan kyai yang mengambil peran sebagai *opinion leader* kepada *innovative leader*. *Innovative leader* berarti memiliki wawasan pemahaman yang cukup luas dari para kyai dan penghayatan mendalam mengenai proses perubahan proses perubahan masyarakat termasuk masalah social yang merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian, kyai akan mampu mengartikulasikan keyakinan, nilai, kaidah dan symbol agama menjadi keyakinan, nilai, kaidah, dan symbol masyarakat. *Kedua, refleksi diri dan autokritik* terhadap situasi kejiwaan/ psikologis komunitas pesantren untuk membukakan jendela dialog nilai antara pesantren dan masyarakat.

Dinamika dan perubahan menurut pesantren menjadikan dirinya sebagai cermin atas realitas zamannya dan menjadi garda depan dalam membimbing moral (*moral design*) masyarakat sebagai benteng moral (*le bastian d'esprit*) mewujudkan Islam sebagai solusi efektif demi masa depan umatnya. Sebagai institusi, pesantren dimana santri yang dibentuk dan berkembang dalam lingkungan cultural pesantren memiliki "peranan seharusnya" (*ideal role*) dapat bergeser pada peranan yang senyatanya (*actual role*). Homogenitas santri regular dapat menjadi *team work* yang padu untuk gerakan tutorial untuk pembangunan di masyarakat, sedangkan heterogenitas santri santri alumni yang masuk dalam semesta diverifikasi pekerjaan dapat dijadikan agen pembangunan sebagai pembawa pesan nilai yang disampaikan secara komunikatif. Sementara Pesantren secara kelembagaan mampu menjadi representasi wujud jeritan dan kegelisahan terhadap realitas yang menyakitkan serta wujud material empirical-partikular di masyarakat. Untuk itu, Pesantren akan menjadi kekuatan yang mencerahkan untuk mengatasi problem kontemporer ketika dibangun di atas konsep yang jelas, sebab gagasan tanpa isi dan substansi adalah kosong/ nihil, dan institusi tanpa konsep adalah buta dan tanpa arah (*Thought without content are empty, institution without concept are blind*).

3 Madrasah dan Problematikanya

Istilah madrasah merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang berarti tempat belajar (Ibrahim Anis, 1972:280). Padanan kata madrasah dalam khazanah pendidikan di Indonesia, adalah sekolah –khususnya sekolah Islam-. Kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang "mengurusi" masalah ilmu keislaman, disimpulkan dalam shorter encyclopedia of Islam

yang menjelaskan madrasah sebagai "name of institution where the Islamic sciences are studied" (H.A.R.Gibb dan H. Kramers, 1961:300).

Sedangkan menurut Malik Fajar menjelaskan madrasah sebagai arti tempat atau wahana anak mengenyam pembelajarannya (1998: 18), artinya di madrasah seorang anak menjalani proses belajar secara terarah, terdapat dan terkendali. Hal ini secara umum menurut Nurhatati Fuad bahwa madrasah memiliki karakteristik yang serupa dengan sekolah. Perbedaannya lebih pada muatan pelajaran agama Islam yang lebih banyak dari sekolah umum, sehingga madrasah seringkali disebut sekolah agama. Meskipun demikian keberadaan madrasah di Indonesia tidak terlepas dari makna ikatan budaya yang melandasinya, yakni budaya Islam (2006: 69).

Menjelaskan definisi tentang sekolah dapat digunakan dalam mendefinisikan tentang madrasah. Sekolah atau madrasah merupakan lembaga yang mengelola sumber daya masyarakat dengan menghadirkan kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat (Haidar Nawawi, 1985: 27). Madrasah merupakan sebuah organisasi yang didalamnya terhimpun kelompok-kelompok manusia yang secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kelompok manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri atas kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, kelompok siswa dan kelompok orang tua siswa.

Tujuan yang ingin dicapai madrasah adalah pencerahan dan perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang terlepas dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, serta bermanfaat bagi diri sendiri, kelompok dan masyarakat banyak (Fua, 2006: 73). Dengan demikian madrasah berfungsi untuk meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui pembentukan karakter agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain madrasah memiliki fungsi mempersiapkan generasi pengganti yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat dengan budaya yang mendukungnya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pendidikan formal pada masa awal Islam belum terselenggara, yang ada adalah kegiatan pendidikan yang bersifat informal, inipun berkaitan erat dengan dakwah islamiah –penyebaran, dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Maka tidak menjadi heran, jika tempat dilakukannya proses pendidikan pada masa itu diawali dari rumah para sahabat yang kita kenal dengan Dar arqam, yang selanjutnya dilakukan di masjid-masjid.

Jauh setelah itu, yakni sekitar abad 11 H, madrasah menampilkannya dirinya sebagai sosok lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat pendidikan umat Islam masa itu. Terlepas dari pertentangan yang ada, madrasah dalam khazanah peradaban Islam memiliki makna penting. Madrasah dianggap sebagai generasi ketiga, setelah masjid dan khan sebagai lembaga pendidikan dalam rentang peradaban Islam –pasca Muhammad diangkat menjadi Rasul-. George Makdisi (1981:27-32) menyatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan dalam Islam telah dimulai dari abad ke 2 H, dimana masjid dijadikan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan hukum. Setelah itu, masjid khan muncul yang dalam perspektif Makdisi memiliki kelebihan dengan menyediakan tempat tinggal bagi yang hendak belajar di masjid. Dan setelah itu, muncullah istilah madrasah yang memberikan fasilitas lebih dibandingkan masjid khan.

Pada fase selanjutnya, adalah Nizham al-Mulk sebagai wazir dari dinasti Saljuk yang mulai mengembangkan madrasah sebagai pilot projek lembaga pendidikan yang berlangsung pada sekitar tahun 459 H/1067 M. Dengan otoritas yang dimilikinya, ia memberi perhatian besar

terhadap perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, walaupun dari berbagai sumber cikal bakal madrasah telah muncul sebelum madrasah nizhamiyah, salah satunya madrasah as-Sa'dyya di Naysapur (1986:1124-1126).

Dalam berbagai penelitian, madrasah dinilai sebagai lembaga pendidikan yang senantiasa menyemarakkan ilmu-ilmu keislaman *an sich*. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan Makdisi dan Sayyed Hossein Nasr. Maka, stempel bahwa legalisme fiqh atau syariah begitu dominan dalam lembaga pendidikan Islam masa itu, disebabkan beberapa hal, Pertama hal ini berkaitan dengan pandangan tentang ketinggian syariah dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kedua, secara institusional lembaga-lembaga pendidikan Islam disokong oleh mereka yang ahli dalam bidang agama, sehingga selanjutnya otoritas dan penghargaan dari lembaga lebih banyak diberikan kepada orang yang ahli dalam agama. Dan faktor ketiga adalah karena madrasah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf. Sehingga langkah ini mendorong pada fungsi madrasah sebagai kawah candradimuka penggemblengan para ahli agama.

Maka, tidaklah mengherankan jika dalam lintasan sejarah peradaban Islam, para ilmuan yang kerap diperkenalkan adalah mereka yang menggeluti dunia keislaman. Penguasaan ilmu agama menjadi sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sehingga seseorang akan dihormati jika telah sampai pada penguasaan ilmu agama yang mumpuni. Dan apalagi jika seseorang mampu melampaui kajian ilmu keislaman tersebut untuk masuk ke dalam dunia lain dalam ranah keilmuan.

Dengan demikian, madrasah dalam khazanah peradaban Islam pada awalnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas keimanan-keislaman. Hal ini ditujukan sebagai bentuk dari keinginan untuk mempertahankan Islam, dan itu berimbas pada tipologi madrasah di Indonesia. Walaupun demikian, fakta tersebut tidak berarti menegasikan pemikiran-pemikiran para pendidik yang menekuni ilmu lainnya.

4 Perkembangan Madrasah di Indonesia

Sebagai salah satu peradaban dunia, madrasah di Indonesia pada awalnya mengadopsi perkembangan madrasah dimana ia tumbuh dan berkembang pertama kali. Azra (2000:72) menyebutkan di Indonesia bahwa istilah madrasah yang berarti sekolah, lembaga tersebut mengacu pada sekolah agama Islam. Di Indonesia, sistem madrasah yang mulai berkembang pada dekade-dekade awal abad ke-20 pada mulanya memfokuskan diri nyaris secara eksklusif pada studi bahasa Arab dan studi-studi Islam, seperti Quran, hadits, fiqh, sejarah Islam dan mata pelajaran Islam lainnya, sebagaimana madrasah dalam lembaran peradaban Islam sebelumnya. Selanjutnya, madrasah secara perlahan mengadopsi sebagian ciri sistem pendidikan modern dan mata pelajaran modern, seperti matematika, geografi dan ilmu-ilmu umum lainnya yang dimasukkan ke dalam kurikulum mereka.

Walaupun demikian, karena madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di Indonesia, maka secara terpaksa atau tidak mekanisme pembelajaran yang diaplikasikan mengikuti aturan yang berlaku di Negara ini. Dalam perpektif Azra, hanya sedikit perbedaan antara madrasah dengan sekolah, dan perbedaan itulah yang kemudian para ahli pendidikan Islam menyebutnya nuansa Islam sebagai pembeda antara madrasah dengan sekolah. Walaupun perbedaan yang muncul tidak begitu besar, akan tetapi secara substansial hal tersebut memberi makna penting dalam perjalanan peradaban Islam.

Secara lebih filosofis, hal kecil sebagai pembeda dengan sekolah nampaknya merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan dalam konferensi Internasional Pertama tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 sebagai berikut: Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir dari pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan simbiosis mutualistik antara masyarakat Muslim dan madrasah itu sendiri. Secara historis kelahiran madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran atau partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Pendidikan madrasah di Indonesia yang lahir sekitar awal abad ke-20 dengan munculnya Madrasah Mambaul Ulum di Keraton Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Kuntowijoyo; 1994), merupakan wujud dari inisiatif dan realisasi dari pembaharuan Islam yang telah ada, yakni antara pengaruh pembaharuan Islam di Timur Tengah, pendidikan Barat dan tradisi pendidikan Islam khas Indonesia, yakni pesantren.

Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal, yaitu: usaha penyempurnaan sistem pendidikan pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Karel Stenbrink, 1984). Dengan kata lain, munculnya sistem pendidikan madrasah juga merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Politik pendidikan Hindia Belanda yakni dengan membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya terbatas pada kaum bangsawan, disamping merupakan politik etik, balas budi, juga merupakan salah satu usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan masyarakat pribumi melalui jalur pendidikan (Zamakhsyari Dhofier, 1984).

Melihat fenomena ini, maka pada awal abad ke-20 dalam kehidupan pesantren terjadi suatu perubahan penting, yakni dimasukkannya sistem madrasah (klasikal) ke dalam pesantren. Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga pendidikan versi Belanda yang ditambahkan muatan agama. Hal ini dianggap sebagai imbang terhadap pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah yang memakai sistem pendidikan Barat (Ensiklopedi Islam, 1993).

Karenanya, membicarakan madrasah di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang pesantren. Bahkan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lebih dahulu lahir di Indonesia dibandingkan dengan istilah madrasah itu sendiri. Madrasah sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan salah satu langkah dari pemerintahan kolonial untuk dapat berada dalam lingkungan bangsa Indonesia.

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang multifungsi. Ia menjadi benteng pertahanan sekaligus pusat penyiaran (dakwah) Islam. Tidak ada data yang pasti tentang awal kehadiran pesantren di Nusantara (Ensiklopedi Islam, 2005). Baru setelah abad ke-16 diketahui bahwa terdapat ratusan pesantren yang mengajarkan kitab kuning dalam berbagai bidang ilmu agama seperti fikih, tasawuf, dan akidah

Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad, Nurcholis Madjid dalam buku beliau yang berjudul *Bilik-Bilik Pesantren* (Paramadina-Jakarta, 1997) menyebutkan, bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (indigenous) Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Dari sini kita memahami bahwa pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; Santri, Kyai dan Asrama.

Banyak dari kita yang memaknai pesantren dengan bentuk fisik pesantren itu sendiri, berupa bangunan-bangunan tradisional, para santri yang sederhana dan juga kepatuhan mutlak para santri pada kyainya, atau disisi lain, tidak sedikit yang mengenal pesantren dari aspek yang lebih luas, yaitu peran besar dunia pesantren dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, begitupula begitu besarnya sumbangsih pesantren dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan.

Dalam sejarahnya, misalnya Pesantren Giri di Gresik bersama institusi sejenis di Samudra Pasai telah menjadi pusat penyebaran keislaman dan peradaban ke berbagai wilayah Nusantara. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat para wali –yang mana kemudian dikenal dengan sebutan wali songo atau sembilan wali-menempa diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk ri Bandang, membawa peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia bagian Timur lainnya. Makassar lalu melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. Mulai dari Makassar, Banten, Srilanka hingga Afrika Selatan.

Di awal Abad 19, Kiai Besari dari Pesantren Tegalrejo-Ponorogo mengambil peran besar. Pesantren ini menempa banyak tokoh besar seperti Pujangga Ronggowarsito. Pada akhir abad itu, posisi serupa diperankan oleh Kiai Kholil, Bangkalan-Madura. Dialah yang mendorong dan merestui KH Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syeikh, santrinya dari pesantren Tebu Ireng - Jombang, untuk membentuk Nahdlatul Ulama (NU). NU pun menjadi organisasi massa Islam terbesar dan paling berakar di Indonesia.

Di jalur yang sedikit berbeda, rekan seperguruan Hadratus Syeikh di Makkah, KH Ahmad Dahlan pun mengambil peran yang kemudian mempengaruhi kelahiran "pesantren modern" seperti Pondok Gontor - Ponorogo. Alur 'moderen' ini juga ditempuh A. Hasan dari Persis-Bangil, juga Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, serta kalangan surau di Minang yang melahirkan Buya Hamka.

Setelah Indonesia merdeka, pesantren banyak menyumbangkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, sebut saja Mukti Ali yang dahulu pernah menjabat sebagai Menteri Agama, M Natsir dan yang lebih terpenting lagi, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Indonesia yang keempat, adalah juga mewakili tokoh yang muncul dari kalangan pesantren.

Ketahanan yang ditampilkan pesantren dalam menghadapi laju perkembangan zaman, menunjukkan sebagai suatu lembaga pendidikan, pesantren mampu berdialog dengan zamannya, yang pada gilirannya hal tersebut mampu menumbuhkan harapan bagi masyarakat pada umumnya, bahwa pesantren dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan alternatif pada saat ini dan masa depan.

Untuk membedakan antara pesantren dan madrasah, Abdul Hafidz Dasuki (1974:30) menjelaskan dalam tesisnya, bahwa:

...it is the madrasah, rather than in the pondok pesantren, that the more modern ideas on education and schooling have generally had the most influence. The madrasah is more like a western –style school than is the pondok pesantren with its dormitory arrangement and traditional, unregulated way of study'

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka madrasah menyesuaikan diri dengan peraturan tentang lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk tingkat dasar kita mengenal madrasah ibtidaiyyah, untuk tingkat menengah kita mengenal madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah sebagai bentuk dari pendidikan Islam tingkat atas. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi kita mengenal ada Sekolah Tinggi Agama Islam dan Insitut Agama Islam Negeri, dan Universitas Islam Negeri.

Fakta tersebut merupakan implementasi dari Surat Keputusan Bersama tiga menteri tahun 1975, bab III, ayat 2 bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan umum pada madrasah, ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun di setiap tingkat sebagai berikut:

1. Pelajaran umum pada madrasah ibtidaiyyah, sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah dasar.
2. Pelajaran umum pada madrasah tsanawiyah, sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah menengah pertama.
3. Pelajaran umum pada madrasah aliyah, sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah menengah atas.

Dikotomisasi tersebut diakui atau tidak mendorong dikotomisasi ilmu. Maka tidak heran kita menyaksikan perbedaan mendasar antara pengelolaan madrasah dengan sekolah, hal yang kerap menjadi persoalan pelik adalah masalah keuangan. Fasilitas yang dimiliki madrasah, kerap kali tidak sebanding dengan yang dimiliki sekolah. Perbedaan yang menganga menjadikan madrasah dicap sebagai lembaga pendidikan kelas dua, dan diperuntukkan "hanya" bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Persoalan tersebut, tidak hanya terjadi pada salah satu tingkat pendidikan, namun hampir di setiap jenjang pendidikan.

Jika kita lihat lebih jauh dalam aturan yang mengatur keberadaan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, maka pada masa orde baru nampak upaya penghapusan term Islam dalam visi berpendidikan di madrasah. Hal ini merupakan tamparan keras bagi para founding father madrasah, karena tujuan yang prinsip adalah bagaimana mensyiarkan Islam kepada masyarakat.

Secara historis, kehadiran madrasah lekat dengan kondisi sosio antropologis masyarakat Bangsa Indonesia. Pendidikan madrasah di Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 dengan munculnya Madrasah Mambaul Ulum di Keraton Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Kuntowijoyo; 1994). Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan Islam yang telah ada, yakni antara pengaruh pembaharuan Islam di Timur Tengah, pendidikan Barat dan tradisi pendidikan Islam di Indonesia (baca pesantren). Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal, yaitu : usaha penyempurnaan sistem pendidikan pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Karel Stenbrink, 1984).

Dengan kata lain, munculnya sistem pendidikan madrasah juga merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Politik pendidikan Hindia Belanda yakni dengan membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya terbatas pada kaum bangsawan, disamping merupakan politik etik, balas budi, juga merupakan salah satu usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan masyarakat pribumi melalui jalur pendidikan (Zamakhsyari Dhofier, 1984).

Madrasah pada awalnya mendapatkan perhatian yang tidak sama dengan sekolah umum. Misalnya mengenai penataan kelembagaan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 1952, yang berisi klasifikasi dan penjenjangan pendidikan madrasah. Berdasarkan keputusan itu, pendidikan di madrasah dilaksanakan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat dasar 6 tahun (Madrasah Ibtidaiyah), tingkat menengah pertama 3 tahun (Madrasah Tsanawiyah), dan tingkat menengah atas 3 tahun (Madrasah Aliyah). Selanjutnya, secara implementatif di madrasah harus diajarkan minimal tiga mata pelajaran akademik yang diajarkan di sekolah umum dan mengikuti standar kurikulum Departemen Agama.

Pasca terbitnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) mendorong pada penguatan madrasah dan kesetaraannya dengan sekolah umum. Secara tidak langsung, hal tersebut membuat langkah perbaikan mutu madrasah semakin muncul. Perubahan drastis dapat dilihat misalnya pada persoalan komposisi kurikulum agama dan umum yang 70 % dan 30 %. Akan tetapi, dengan inisiatif dan keberanian dari Menteri Agama waktu itu, Mukti Ali, dijelaskan bahwa dalam prakteknya kedua mata pelajaran tersebut dapat saling mengisi, sehingga sama-sama 100 % (Biografi Sosial-Politik Menteri-menteri Agama RI, 1998).

Selanjutnya, munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memperjelas posisi madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Madrasah Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar berciri khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah SLTP berciri khas Islam dan Madrasah Aliyah adalah SMU berciri khas Islam. Konsekwensi dari semua itu adalah bahwa madrasah harus memberikan materi kurikulum minimal sama dengan materi kurikulum yang ada di sekolah umum.

5 Pendidikan Karakter

Karakter berasal dari Bahasa Yunani *charasein*, yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola. Dan sepertinya sulit untuk mengidentifikasi pola seperti apa yang dikehendaki oleh oleh setiap entitas. Karena bisa saja pola yang telah dibuat dapat disepakati atau disetujui oleh pihak tertentu, akan tetapi oleh pihak lain tidak dapat menyetujuinya. Perlu kearifan untuk sampai pada *collective agreement* mengenai pola, apalagi karakter sebuah bangsa. Disitu akan bersinggungan dengan makna filosofis, historis, yuridis, dan juga subjektivisme dari orang per orang yang memperbincangkannya.

Makna pendidikan karakter sejatinya sudah ada dalam praktik pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari pelbagai praktik pendidikan, baik formal, informal maupun non formal, atau pada kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler. Ada beberapa nilai dari karakter yang kerap diinternalisasikan dalam setiap kegiatannya seperti kejujuran, keberanian, kemandirian dan tanggung jawab. Dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, pendidikan di Indonesia perlu diperluas hingga dapat menyentuh citra budaya keindonesiaan yang majemuk dan senantiasa berkembang dari zaman ke zaman (Bagus Mustakim, 2013: 41)

Politik etis adalah salah satu bentuk pendidikan karakter –diakui atau tidak- yang telah dilakukan oleh penjajah Belanda. Secara tidak langsung, penjajah dengan sadar “membentuk” karakter pribumi secara mayoritas sebagai karakter mental pegawai. Politik etis hanya berlaku bagi golongan tertentu yang sangat terbatas. Karenanya, pada saat yang sama kita menemukan jurang yang menganga antara produk dari politik etis dengan politik pendidikan untuk para masyarakat kebanyakan.

Menurut Siti Fatimah⁷, bahwa perubahan kebijakan pemerintah colonial Belanda yang mulai memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum pribumi merupakan dampak dari perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda. Saat itu, pemerintah Belanda dikuasai oleh kekuatan politik beraliran kontemporer (Bagus Mustakim, 2012: 42). Produk dari gerakan politik kontemporer di Belanda menghasilkan gerakan politik etis di tanah jajahan, dimana salah satu tokohnya adalah Van De Venter. Untuk memperkuat gagasannya dengan membuat buku yang berjudul “*Hutang Kehormatan*” pada tahun 1899. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa dari tanah jajahan, Belanda mendapatkan keuntungan 187.000.000, 00 gulden dari tanah jajahan Hindia Belanda. Sudah barang tentu harus ada yang “dikembalikan” kepada tanah jajahan.

Fatimah menambahkan, bahwa :

Sejak tahun 1878, ia menuntut agar uang tersebut dikembalikan. Sejak saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mulai memberikan perhatian yang agak serius terhadap pendidikan di Nusantara terutama di Pulau Jawa. Salah satunya adalah kebijakan dalam memperbaiki dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk golongan Eropa Non-Belanda dan kaum pribumi, serta memperbaiki kesenian dan ilmu pengetahuan di Negara jajahan. Realisasi dari kebijakan tersebut adalah menugaskan kepada semua gubernur jenderal untuk mengatur agar di setiap kabupaten di Nusantara dapat didirikan sebanyak mungkin lembaga pendidikan (sekolah). Dengan begitu, lebih banyak remaja pribumi mendapatkan kesempatan belajar. Namun dalam pelaksanaannya, politik etis pendidikan colonial Belanda hanya dinikmati oleh segelintir kaum bangsawan tinggi, itu pun yang berhaluan nasionalis yang cenderung bersikap kompromi terhadap pemerintah penjajah. Beberapa pemuda potensial yang berhaluan Islam masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan mereka.

Kebijakan pendidikan sejenis politik etis kemudian dikembangkan pada masa penjajahan Jepang akan tetapi mereka tidak terjun langsung dalam menyelenggarakan pendidikan. Penjajah Jepang hanya menjanjikan mendirikan lembaga pendidikan yang dapat dinikmati oleh rakyat, sebagai kompensasi dari romusha. Dengan sedikit dukungan dari penjajah jepang, tokoh-tokoh bagi kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara dengan didukung oleh Husein Djajadiningrat, Asikin, Rooseno, Ki Bagus Hadikusuma, dan KH. Masykur merumuskan pokok-pokok cita-cita pendidikan dan pengajaran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengembangkan pendidikan yang memelihara dan mengembangkan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan sebaik-baiknya. Hal ini kemudian menginspirasi Undang-undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Dalam garis-garis adab perikemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam pengajaran agama-agama, seyogyanya pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.
3. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan usaha asli yang merupakan puncak kebudayaan

⁷ Jurnal Media Pendidikan, Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bdg

daerah0daerah di seluruh Nusantara, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya budaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

4. Usaha pendidikan seyogyanya dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus semua warga Negara dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan kebudayaan. Pihak rakyat diberi kesempatan seluas mungkin untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraanya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh pemerintah.
5. Tentang susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian khusus, harus sedikit-dikitnya (*minimum leer plan*) ditetapkan dalam suatu mata pelajaran, yang dengan pelajaran itu dapat menetapkan secara lebih luas dan lebih tinggi pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta mendorong pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat kerja, kekeluargaan, cinta tanah air dan keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir (Fudyartanta, 2010: 131-132).

Mencermati pokok-pokok cita-cita pendidikan di atas, ternyata pendidikan Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan telah mampu meletakkan sendi-sendi pendidikan karakter Indonesia. Rumusan di atas bahkan telah menunjukkan bahwa dalam membangun karakter Bangsa (*national character building*) Indonesia harus mengandung tiga unsur utama yaitu pendidikan, keagamaan dan budaya bangsa. Pendidikan dibangun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama dan religiusitas yang memang sudah menjadi karakter bangsa diharapkan mampu membentuk iman dan akhlak bangsa. Sedangkan budaya diarahkan untuk membangun nasionalisme kebangsaan majemuk dan berkembang terus-menerus. Dengan demikian pendidikan karakter bangsa pada masa awal kemerdekaan dibangun di atas dua pondasi pendidikan, yaitu pendidikan agama, dan pendidikan budaya bangsa.

Berarti sejak awal kemerdekaan, pendidikan agama dijadikan sebagai pondasi utama sistem pendidikan nasional disamping Modernisme Barat dan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia. Jika digabungkan kembali, ternyata pendidikan karakter Indonesia dibangun di atas tiga pondasi, yaitu agama, modernism Barat dan Nasionalisme kebangsaan Indonesia. Pengetahuan agama diharapkan mampu membentuk kepribadian unggul berdsarkan nilai-nilai luhur yang dibangun dalam tradisi keagmaan. Modernism barat ditunjukkan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki nalar keilmuan rasional dan ilmiah. Nasionalisme kebangsaan Indonesia diarahkan pada pembentukan jiwa patriotis dan kecintaan terhadap tanah air. Tiga pondasi ini mengarah pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang religious, cerdas dan nasionalis.

Beberapa tahun ke belakang, kajian tentang *civil society* dan keresahan pendidikan Nasional merupakan wacana yang sedang hangat dibicarakan. Slogan demi slogan yang dikumandangkan mencoba mengacu pada cita-cita untuk membangun "Indonesia Baru". Lalu bermunculanlah berbagai bentuk konsep untuk membangun cita-cita yang dimaksud.⁸ Dengan arus globalisasi sekarang ini, madrasah di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang begitu besar. Tantangan tersebut acap kali berimplikasi pada pergeseran nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai kebudayaan yang telah eksis di tengah-tengah masyarakat.

⁸ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia)*, (Jakarta, Kencana, 2008), cet, ke -I

Salah satu instruksi presiden No 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional tahun 2010 adalah pendidikan yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif yang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Selanjutnya tanggal 2 Mei 2010 yang lalu, Mendiknas RI mendeklarasikan dimulainya pendidikan karakter bangsa. Mencuatnya gagasan tersebut, tentu saja bukan merupakan ide instant, melainkan bagian dari proses panjang keresahan atas fenomena-fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi kekhawatiran adalah bukan fakta di level akar rumput, lebih dari itu yang lebih ironis ialah di tingkat elit. Notabene mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan tinggi, tapi jauh dari apa yang diharapkan dari tujuan mulia pendidikan itu sendiri.

Sebelum Inpres 2010 itu muncul, Departemen Pendidikan (dan Kebudayaan) Nasional telah mengidentifikasi beberapa karakter yang proporsional dengan kondisi Bangsa Indonesia, yakni mencapai 49 kualitas karakter. Seluruh karakter tersebut adalah sebagai berikut: (1) *alertness*: kewaspadaan; (2) *attentiveness* : perhatian; (3) *avaibility* : kesediaan; (4) *benevolence*: kebajikan; (5) *boldness*: keberanian; (6) *cautiousness* : kehati-hatian; (7) *compassion*: keharusan, rasa peduli yang tinggi; (8) *contentment*: kesiapan hati; (9) *creativity*: kreativitas; (10) *decisiveness*: bersifat yain; (11) *deference*: rasa hormat; (12) *dependability*: dapat diandalkan; (13) *determination* : berketetapan hati; (14) *diligence*: kerajinan; (15) *discemment* : kecerdasan; (16) *discreation*: kebijaksanaan; (17) *endurance*; ketabahan; (18) *enthusiasm* : antusias; (19) *faith*: keyakinan; (20) *flexibility*: kelenturan/keluwes; (21) *forgiveness*: pemberi maaf; (22) *generosity*: dermawan; (23) *gentleness*; lemah lembut; (24) *gratefulness*: pandai berterima kasih; (25) *honor*: sifat menghormati orang lain; (26) *hospitality*: keramahtamahan; (27) *humility*: kerendahan hati; (28) *initiative*: inisiatif; (29) *joyfulness*: keriang; (30) *justice*: keadilan; (31) *loyalty*: kesetiaan; (32) *meeekness* : kelembutan hati; (33) *obedience*: kepatuhan; (34) *orderliness*: kerapihan; (35) *patience*: kesabaran; (36) *persuasiveness*: kepercayaan; (37) *punctuality*: ketepatan waktu; (38) *resourcefulness*; kecerdikan, panjang akal; (39) *responsibility*: pertanggungjawaban; (40) *security*: pelindung; (41) *self-control*: control diri; (42) *sensitivity*: kepekaan; (43) *sincerity*: ketulusan hati; (44) *throughness*: ketelitian; (45) *thriftiness*: sikap berhemat; (46) *tolerance*: toleransi; (47) *truthfulness*: kejujuran; (48) *virtue*: sifat bajik; dan (49) *wisdom*: kerifan, kebijaksanaan (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 107).

49 karakter itu memang dapat mencirikan karakter Bangsa Indonesia yang akan dibentuk. Akan tetapi karena terlalu luas, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui laman <http://www.kemendiknas.go.id> mempublikasikan 9 karakter hasil “kesimpulan” dari 49 karakter yang telah disepakati. 9 karakter tersebut adalah: (1) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah dan diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, duka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan kerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Gagasan mengenai karakter, tidak berdiri sendiri. Awalnya muncul pada sarasehan nasional pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2010. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari seresehan tersebut, adalah: (a) pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian internal yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh; (b) pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh; (c) pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut;

(d) dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 105-106).

M. Nuh menegaskan bahwa “Implementasi pendidikan karakter di Indonesia dirancang untuk diajarkan pada semua tingkat pendidikan, mulai dari level SD/MI hingga Perguruan Tinggi. Menurut Mendikbudnas, Muhammad Nuh, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini, jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka karakter seseorang tidak akan mudah terombang-ambing. Mendikbudnas berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa (Ceramah di Auditorium Universitas Negeri Medan (UNIMED), pada hari Sabtu, 15 April 2010).

Pasca pidato tersebut, respons akademisi dan para pegiat pendidikan serta masyarakat begitu luar biasa. Sehingga, karakter bukan saja menjadi bahan dialektika para pegiat pendidikan, bahkan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum dan mata kuliah. Misalnya di program pascasarjana UIN SGD Bandung, bahkan di Strata 3 (program doktor). Diskursus tentang karakter tidak henti-hentinya diselenggarakan, pelbagai buku tentang karakter dari sudut pandang tampil mengemuka. Fakta ini menunjukkan bahwa memang Bangsa Indonesia telah mengakui kehampaan dan kekeringan atas apa yang tengah dialami dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa telah massif tentang kebutuhan atas realitas hidup yang tidak hanya bersifat materialistis, faktor kebendaan semata. Tidak cukup dengan memahami dan mengerti sebuah teori, akan tetapi bagaimana mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan yang kompleks.

Bahagian lain, Megawangi mengutip pernyataan dari John Luther (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007) bahwa “*good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to same extent a gift. Good character, by contrast, is not given us. We have to build it peace by peace-by thought, choice, courage, and determination.*” Kesimpulannya bahwa karakter bukan sesuatu yang bersifat *given* (terberi tanpa ada usaha untuk meraihnya). Menurut Luther untuk membentuk karakter, perlu dibangun dan melalui proses yang panjang dan tidak sederhana. Misalnya untuk mendapatkan karakter jujur saja, pihak-pihak yang terlibat bukan saja orang tua dan guru di dalam kelas, lingkungan masyarakat atau juga para pemimpin bangsa yang memberi contoh ketidakjujuran. Dan yang paling sulit dihindari adalah serbuan dari media massa, khususnya elektronik.

Ahmad Tafsir merespons deklarasi pendidikan karakter bangsa itu dengan pernyataannya bahwa momentum itu, harus disambut dengan penuh antusias. Tafsir menambahkan, agar deklarasi itu mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu memperbaiki karakter orang Indonesia, dan hendaknya deklarasi itu tidak sekedar deklarasi, bukan sekedar mengingatkan, deklarasi itu harus diikuti oleh penancangan perubahan paradigma, yaitu berpindah dari paradigma bahwa pendidikan akhlak hanya oleh guru agama dan PKn ke paradigma bahwa pendidikan karakter itu adalah tugas semua aparat yang terkait dengan murid.⁹

Terminology karakter itu sendiri perlu diproporsikan dengan tepat, karena kerap terjadi kekisruhan. Menurut Fuad Wahab tidak sedikit yang mengatakan bahwa istilah karakter sama dengan istilah akhlak dalam pandangan Islam.¹⁰ Dalam berbagai kamus; karakter (character)

⁹ Makalah pada Seminar Internasional di Universitas Internasional Batam,

¹⁰ Diantaranya; A.Tafsir dalam Pendidikan Karakter (handout), Ratna Megawangi dalam; Pendidikan Karakter Untuk Membangun Masyarakat Madani, Indonesia Heritage Foundation.

dalam bahasa Arab diartikan: *khuluq, sajiyyah, thab'u*,¹¹ yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan; budi pekerti, tabiat dan watak. Ada juga yang mengartikan sebagai *syakhshiyah*, yang lebih dekat pengertiannya kepada personality yang merupakan kumpulan dari berbagai aspek.¹²

Selanjutnya Fuad Wahab¹³ menjelaskan karakteristik akhlak Islam punya, di antaranya:

1. *Al-khairoh al-muthlaqoh*. Perbuatan kebaikan yang terhindar dari ego perorangan, tidak mengunggulkan sebagian manusia dari yang lainnya, atau merespon keinginan hawa nafsu dan tuntutan lingkungan dan relasi. Yang melakukan kebaikan atau meninggalkan perbuatan buruk tidak mengharapkan balasan dari sesama manusia, tidak pula menjadikannya sebagai tangga meraih kekuasaan atau karena ingin terkenal. Hal ini dikarenakan balasan yang paling memadai adalah dari Allah, dan kebaikan hendaknya dilakukan semata menggapai ridlo-Nya. Bandingkan dengan sifat terpuji *alkarom* pada masa Arab Jahiliyah.
2. *Al-sholahiyah al-'aamah*. Kebaikan akhlak Islam bisa dilakukan semua orang di setiap masa dan tempat, dikarenakan; mudah, gampang, tidak rumit, adil, tidak merusak, dan tidak menuntut sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Keutamaan yang membuat hati damai dan tentram. Hati nurani menyambutnya, dan akal sehat mendukungnya. Perhatikan Firman Allah: *Allah meghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* (Q.S.al-Baqarah:185) *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.* (Q.S.al-Baqarah:286) *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.* (Q.S.al-An'am:152) *Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada manusia* (Q.S.al-Haj:65)
3. *Al-Tsabat*. Permanen tidak berubah, dikarenakan lahir dari Dzat Yang Maha Tahu tentang manusia.
4. *Al-Iljam al-Mustajab*. Akhlak Islam memberikan kekuatan untuk dipatuhi dalam berbagai keadaan. Dalam keadaan menyendiri atau banyak orang, dalam keadaan lapang dan sempit. Hal ini dikarenakan yang mengawasinya adalah *Alah Yang tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi*. Semua; dipersembahkan untuk Sang kekasih yang ditaati.¹⁴

Pada sisi lain, perlu diperhatikan indikator-indikator pendidikan karakter dari penggagas pendidikan karakter itu sendiri. Pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966),¹⁵ -sebagai orang yang mencetuskan pendidikan karakter sebagai reaksi atas kejumudan berbagai teori pedagogi-, mengatakan bahwa ciri dasar pendidikan karakter ada 4 yaitu:

1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai.

¹¹ Ali al-Khuli, *Dictionary of Education English Arabic*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1981, h.61,

J.Milton Cowan, *A Dictionary of Modern –Written Arabic*, Beirut: Du Liban, 1974, h.258.

¹² Ali al-Khuli mengatakan:

2. شخصية: مجموعة سمات الشخص التي تتميز بالديمومة مثل الأخلاق، ص 61

ب. مجموعة خصائص الفرد السلوكية والخلقية والانفعالية والجسدية وقدراته وميوله كما يراها الآخرون ص 349

¹³ Makalah pada Seminar Internasional di Universitas Internasional Batam,

¹⁴ *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyyah fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, al- Daar al-Arobiyyah lil Kitab, 1993, h. 45-54.

¹⁵ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter*, PT. Grasindo; Jakarta. hlm 42-43

2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
3. Otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.
4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Menurut Nur Aisyah Buang (guru besar UKM Malaysia), karakter secara keseluruhan melambangkan keperibadian seseorang. Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah sebatik dalam diri seseorang yang dilahirkannya dalam bentuk tingkah lakunya. Gabungan pelbagai karakter inilah yang merupakan keperibadian yang memberikan individu ini perspektif prinsip hidupnya yang terjermah dalam cara beliau bertindak terhadap apa sahaja dalam persekitarannya. Karakter tidak semestinya merujuk kepada karakter moral dan etika seseorang itu sahaja tetapi meliputi aspek *karakter intelektualnya*, *karakter emosinya*, *karakter jasmaninya*, *karakter spiritualnya* dan akhir sekali *karakter sosialnya* (JESIS). Semua karakter ini mesti saling berintegrasi sebagai satu SISTEM dalam pembentukan keperibadian seseorang yang seimbang. Karakter dalam diri seseorang pula terbahagi kepada karakter positif yaitu karakter yang baik dan karakter negatif yaitu karakter yang tidak baik.

Walau bagaimana pun, perkataan karakter sering dimaksudkan kepada satu aspek karakter yaitu karakter rohani yang meliputi ciri moral dan etika. Terdapat tujuh (7) prinsip untuk mendefinisikan karakter

1. Karakter meliputi semua ciri atau kualiti yang dimiliki oleh seseorang.
2. Karakter merupakan satu tabiat (*habit*) cara berfikir, bercakap dan bertingkah laku. Karakter positif meliputi entusiastik, tepat waktu, boleh diharapkan dan amanah.
3. Karakter positif boleh dibentuk (begitu juga karakter negatif boleh dibuang) dengan kesungguhan yang berterusan.
4. Setiap insan bertanggungjawab di atas keputusannya sendiri. Oleh itu karakter boleh diubah jika seseorang itu mengambil keputusan untuk mengubah karakternya walaupun elemen persekitaran dalam hidupnya telah banyak mempengaruhi karakternya yang tersedia ada.
5. Karakter boleh dibentuk tetapi memerlukan motivasi untuk mendorong individu tersebut melakukannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa tidak akan menipu semasa menduduki peperiksaan kerana takut ditangkap oleh pengawal (motivasi eksternal) atau semata-mata ingin memartabatkan rasa hormat dalam diri sendiri (motivasi internal).
6. Setiap insan memang sudah terbentuk karakternya semasa membesar dari kecil hingga dewasa. Oleh itu, beliau harus boleh menilai samada ia karakter positif dan karakter negatif. Oleh itu, insan ini harus duduk dalam persekitaran yang terus mengingatkan dan menggalakkan kepada karakter positif.
7. Setiap insan boleh memiliki karakter positif. Beliau hanya perlu berusaha kearah itu.

Jika kita perhatikan definisi pendidikan karakter menurut David Elkind and Freddy Sweet bahwa; *Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.*

Jadi pendidikan karakter, bagaimana seseorang dapat berperilaku mengerti, memahami dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etik.

Pada sisi lain, perlu diperhatikan indikator-indikator pendidikan karakter dari penggagas pendidikan karakter itu sendiri. Pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966),¹⁶ -sebagai orang yang mencetuskan pendidikan karakter sebagai reaksi atas kejumudan berbagai teori pedagogi-, mengatakan bahwa ciri dasar pendidikan karakter ada 4 yaitu:

1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai.
2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
3. Otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.
4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Objek Kajian; Lembaga Pendidikan Di Jawa Barat

Berdasarkan informasi dari www.jabarprov.go.id, bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi pemerintahan periode 2013-2018. Visi Jabar tahun 2013-2018 adalah: "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
2. Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk
3. Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Sedangkan misi yang diemban oleh pemerintah Provinsi Jabar tahun 2013-2018 memiliki 5 misi;

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta

¹⁶ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter*, PT. Grasindo; Jakarta. hlm 42-43

- menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
 5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Secara kelembagaan bahwa visi dan misi Jabar 2013-2018 adalah bagaimana menciptakan manusia sebagai agen pentingnya. Misalnya, dari misi yang tertulis yakni Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Artinya pembangunan manusia menjadi pembangunan yang sangat penting. Masyarakat agamis dan berakhlak mulia menjadi rujukan awal dari misi tersebut. Dan setidaknya hal tersebut berkelindan dengan gagasan pendidikan karakter yang telah dicetuskan oleh pemerintahan pusat.

Jawa Barat erat kaitannya dengan budaya, maka Yadi Ruyadi¹⁷ menjelaskan dalam proceedingnya tentang model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya local, yakni;

Bahwa sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, kondisi, politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, HAM, sosial, budaya, moral, dan pendidikan cukup memprihatinkan. Pada bidang moral memperlihatkan kondisi mental, karakter, budi pekerti, dan akhlak bangsa yang sangat memprihatinkan seperti perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti luhur, dan perilaku yang seolah-olah tidak ada tatanan hukum positif. Situasi ini seperti situasi yang "anomie, yaitu memudarnya nilai-nilai yang berlaku dan tidak adanya norma atau nilai-nilai bersama"(Soekanto, 1993:26).

Yadi menambahkan bahwa di kalangan siswa dan generasi muda juga terjadi perilaku menyimpang yang tidak berbudi pekerti luhur seperti geng motor, perkelahian pelajar (tawuran), perkelahian antar mahasiswa, tawuran di antara geng pelajar perempuan, free sex, dan aborsi. Demikian juga mulai tampak adanya tanda-tanda meninggalkan budaya lokal dan beralih ke budaya barat. Hal tersebut seperti dalam bidang seni, fashion, kegemaran, selera makanan, dunia hiburan, bahasa, gaya hidup, interaksi anak dengan orang tua, interaksi murid dengan guru, budaya sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Kemudian di sisi lain kebijakan Pendidikan Budi Pekerti/pendidikan karakter dalam Kurikulum Sekolah mengalami pasang surut. Berdasarkan hasil analisis Supriadi (2004: 162-166) terhadap kurikulum Pendidikan Budi Pekerti/pendidikan karakter, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter pertama kali diperkenalkan dalam Kurikulum 1947 sebagai mata pelajaran tersendiri;

¹⁷ Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010

pada Kurikulum 1964 disatukan menjadi pelajaran agama/budi pekerti; pada Kurikulum 1968 pendidikan budi pekerti hilang, baik sebagai nama mata pelajaran tersendiri maupun sebagai mata pelajaran yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Kemudian pada Kurikulum 1975 pendidikan budi pekerti sudah tidak muncul lagi, yang muncul adalah mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan mata pelajaran Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada Kurikulum 1984 menurut Chan dan Sam (2005: 18) "Pendidikan budi pekerti dihapuskan dalam daftar mata pelajaran di sekolah". Pada kurikulum 1994 pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter kurang mendapat perhatian. Demikian juga pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 tidak disebutkan pendidikan budi pekerti sebagai mata pelajaran tersendiri. Kebijakan pemerintah seperti ini berdampak kurang berjalannya pendidikan budi pekerti di sekolah. Sementara itu zaman telah berubah, tantangan kehidupan global sudah terasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak jarang globalisasi juga melahirkan eksese negatif terhadap melemahnya kearifan budaya lokal. Globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan di bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membawa negara-negara di dunia masuk ke dalam sistem jaringan global, satu dunia telah mengubah menuju peradaban dunia baru. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia sebab dengan kecanggihan teknologi itu seluruh informasi yang datang dari berbagai belahan dunia dapat diakses langsung di mana saja dan kapan saja. Apabila tidak diantisipasi dengan memperkuat filter budaya dan agama, maka globalisasi akan dapat merugikan terhadap eksistensi nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai local wisdom-nya. Menurut Alwasilah (2009: 50) "Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional (etnodidaktik) yang terbukti ampuh, seperti pada masyarakat adat Kampung Naga dan Baduy dalam melestarikan lingkungan". Namun, sebenarnya secara keseluruhan masyarakat adat yang ada telah menyelenggarakan pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan tradisi, termasuk pendidikan budi pekerti secara baik.

Masyarakat adat yang masih tetap eksis, telah memelihara local wisdom-nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakatnya. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua hal yang harus mendapat perhatian. Pertama, munculnya fenomena menurunnya budi pekerti luhur di kalangan siswa. Kedua, belum adanya model pendidikan karakter di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dapat membentuk karakter siswa. Perlu dicari dan dirumuskan model pendidikan karakter yang efektif untuk dapat dilaksanakan di sekolah.

Pendidikan karakter adalah pendidikan jangka panjang, tidak bisa instan. Dalam sebuah acara KH. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. -pembaharu pendidikan Islam di Indonesia, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor- menyatakan bahwa pendidikan adalah penugasan, pembelajaran, pembiasaan bahkan pemaksaan. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwasanya semua yang anak dengar, lihat dan rasakan haruslah bentuk pendidikan. Oleh karenanya, eksistensi sebuah lembaga begitu sangat penting. Pesantren dan madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang menjadi khas di Indonesia.

Ahmad Tafsir kerap menyatakan dalam berbagai forum pendidikan, bahwa "mendapatkan sekolah Islam yang baik, sama sulitnya dengan menemukan sekolah non Islam yang tidak baik". Pernyataan tersebut merupakan fenomena salah satu lembaga pendidikan di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Walaupun demikian, tulisan ini tidak akan memberi jurang dan elaborasi pada

dikotomi Islam dan non Islam, akan tetapi lebih menitikberatkan pembahasan pada persoalan lembaga pendidikan di Indonesia.

Komponen pendidikan yang memegang peranan penting dalam proses pendidikan tersebut, adalah lingkungan pendidikan. Secara teoritis, Mahmud Yunus menyatakan bahwa (218-220) lingkungan pendidikan terdiri atas, rumah tangga, sekolah, tempat bermain dan lingkungan pergaulan. Sedangkan Atiyah Al-Abrasy sedikit berbeda, yakni selain rumah tangga dan sekolah, adalah lingkungan pergaulan dengan teman-temannya.

Rumah tangga dan sekolah kerap menjadi point penting dalam pembahasan tentang lingkungan pendidikan. Akan tetapi, acap terjadi pula penempatan prioritas yang keliru tentang hal itu. Yang berakibat pada system pendidikan yang tidak berjalan dengan baik. Alferd North Whitehead (1967; 1) menyatakan:

In the history of education, the most striking phenomenon is that schools of learning, which at one epoch are alive with a ferment of genius, in a succeeding generation exhibit merely pedantry and routine. The reason is that they are over laden with inert ideas. Education with inert ideas is not only useless; it is, above all things.

Terlepas dari kritikan Whitehead tentang sekolah, bahwa didalamnya acap kali ditemukan sikap dan perilaku terlalu menonjolkan diri dalam keilmuan atau superioritas (pedantry) dan perilaku yang itu-itu saja (routine), yang berimplikasi pada tumpulnya gagasan atau ide yang muncul dari pelaku-pelaku di sekolah. Akan tetapi, lembaga pendidikan ini senantiasa menjadi “penyambung lidah” kebijakan dari pemerintah. Jargon sekolah gratis, 20% anggaran untuk pendidikan –yang peruntukannya lebih banyak dinikmati lembaga pendidikan- adalah contoh betapa sekolah selalu menjadi prioritas.

Kemudian, akhir-akhir ini kita diperkenalkan dengan istilah “baru”, sekolah berstandar internasional atau rintisannya. Sekolah dengan prospek yang terlihat “lebih terang”, dan sarat prestise. Dan beragam aturan dan system berkaitan dengan hal itu dibuat, bahkan nampak semakin eksklusif. Maka, tak pelak orang tua berjibaku, bersusah-susah mengerahkan berbagai potensinya agar anaknya sampai dan berhasil masuk di sekolah SBI atau RSBI itu. Anak-pun terkadang menjadi “korban” asa dan cita-cita orang tuanya.

Adalah hal yang lumrah dan wajar harapan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang berkualitas. Dengan manajemen dan administrasi yang telah diakui, sekolah berkualitas lebih menjanjikan masa depan. Tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak dapat dianggap angin lalu. Akan tetapi, dalam konteks system pendidikan, ada hal yang perlu untuk ditelaah lebih dalam, yakni eksistensi serta kontribusi rumah tangga, keluarga, dan orang tua dalam lingkungan pendidikan. Sinergi antara pendidikan yang berlangsung di rumah tangga dan sekolah, tidak hanya membimbing peserta didik menjadi manusia yang “lulus, ” lebih dari itu ia akan mampu menjani hidup.

Kita tentu masih ingat, berapa banyak orang yang telah berhasil dalam bidangnya masing-masing –tentu dalam proses pendidikan-, tidak pernah melupakan jasa, eksistensi dan kontribusi pendidikan di rumah tangga dari keluarga serta orang tuanya. Satu contoh dalam film fenomenal “Laskar Pelangi”, betapa peran pendidikan dalam rumah tangga, menjadi entry point positif untuk menjaga cita dan asa dalam kehidupannya.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, jumlah madrasah dari tingkat Raudhatul Atfal (RA) sampai dengan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 13.801 dan

pesantren sejumlah 8. 231 (data tahun 2014). Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa terminology pesantren dan madrasah mendapatkan posisi yang berbarengan. Untuk itu, akan dipaparkan lembaga pendidikan Islam di Jawa Barat yang secara konsisten menanamkan karakter –dalam konteks Indonesia- pada santrinya.

1. Pesantren ar-Riadh, Cianjur

Didirikan oleh K. H. Enoch Muqoddas (alm) pada sekitar tahun 1950-an di daerah Pacet. Awalnya lembaga pendidikan yang didirikannya adalah murni pesantren, akan tetapi lama-kelamaan, dan merupakan bagian dari kontekstualisasi, maka sekarang terdapat 9 unit bentuk pendidikan di bawah yayasan ar-Riadh. Artinya, dikotomisasi pesantren dan madrasah menjadi sangat tipis dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia –walaupun tentu saja kajian sejarahnya memiliki catatan masing-masing-.

Perlu diperhatikan visi misi dari pesantren ini, yakni; Visi; Terwujudnya lulusan yang bermulti kecerdasan, keterampilan hidup dan berakhlakul karimah. Sedangkan misinya, adalah:

- a. Menciptakan iklim pembelajaran yang efektif sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan
 - b. Menciptakan lingkungan belajar yang berkultur salafi, modernis dalam pemikiran dan santun dalam berperilaku.
 - c. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan, patriotism, nasionalisme, dan religisitas.
 - d. Mengembangkan pembinaan mutu terhadap seluruh warga pondok dan madrasah.
- Penjabaran dari visi misi di atas, terletak pada karakteristik yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam kasus ar-Riadh, Cianjur ini, adalah:
- a. Integrasi antara kajian salaf dan khalaf diupayakan semaksimal mungkin.
 - b. Meminimalisir potensi syahwat, adalah dengan memisahkan proses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kecuali pada momentum tertentu disatukan.
 - c. Disiplin menjadi penting dalam pembentukan akhlak santri.

2. Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya

Didirikan oleh K.H. Choer Affandi (Alm), yang berharap agar pesantren yang dikelolanya dapat mencetak orang-orang yang shaleh dan para ajengan (kyai) yang nantinya dapat memberi bimbingan keagamaan pada masyarakat. K.H. Choer Affandi (Alm) atau yang lebih dikenal dengan uwa ajengan, kerap memimpin senam kesegaran jasmani pada hari Jumat.

Visi dan misi dari pesantren ini adalah menyeru manusia untuk berbuat kebajikan dan melarang dari berbuat kejahatan. Dimana penjabarannya adalah sebagai berikut;

- a. Mencetak pribadi muslim yang bertawakkal kepada Allah
- b. Mencetak imam al-muttaqin
- c. Mencetak ulama al-‘amilin
- d. Terampil dalam membangun diri, agar kelak tidak menggantungkan diri pada orang lain.
- e. Mencegah adanya manusia jahat yang timbul dari tidak adanya keimanan, karena kebodohan dan kesombongan yang akan merugikan Negara.

Salah satu cara pembentukan akhlak, adalah melalui Tasmida (Tabungan Santri Miftahul Huda). Uang pemberian orang tua, tidak dapat disimpan oleh santri, akan tetapi disimpan di Tasmida. Pengambilan uang jajan dilakukan per satu minggu, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing santri yang telah disepakati wali dengan pengurus pesantren.

3. Pesantren Pembangunan Sumur Bandung, Cililin, Bandung
Kehadiran lembaga pendidikan tahun 1972 ini, merupakan keinginan besar dari para *founding fathers*nya agar para santrinya dapat menjadi penerus ulama. Karenanya, visi pesantren ini, adalah mencetak kader ulama intelek dan intelektual ulama yang senantiasa mencerminkan akhlakul karimah dalam setiap sikap dan perbuatannya. Seperti halnya absurditas pesantren lainnya di Indonesia, ketidakjelasan apakah pesantren “murni” atau berkolaborasi dengan madrasah dan atau sekolah terjadi juga di pesantren pembangunan Sumur Bandung ini. Walaupun demikian, yang lebih ditekankan adalah eksistensi Sekolah Menengah Aliyah-nya.
4. Pesantren Cipasung, Tasikmalaya
Di kalangan Nahdliyyin Jawa Barat, nama Pesantren Cipasung adalah fenomenal. Pesantren ini didirikan sekitar tahun 1931 oleh K.H. Ruhiyat (alm), pembinaan awalnya adalah generasi muda, yakni dengan dibentuk Madrasah Diniyah dan Kader Mubalig wal Musyawwirin. Fakta ini menunjukkan bahwa founding father dari pesantren ini memiliki pemikiran yang futuristic, bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang agar lebih baik pada masanya. Maka, pembinaan generasi muda merupakan pilihan tepat, sehingga pada saat mereka dihadapkan pada problematika dan pilihan hidup yang dilemati, ia dapat bertahan dengan ajeg pada doktrin dan ideologi pesantren. Kontekstualisasi, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan respons pesantren Cipasung terhadap perubahan zaman. Hal itu dapat dilihat dari berbagai bentuk studi pendidikan yang berlangsung di pesantren tersebut sampai hari ini. Hal itu merupakan wujud dari visi pesantren yakni, dengan iman dan takwa, santri memiliki kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan zaman dengan menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.
5. Pesantren al-Jawami, Cileunyi, Bandung
Pesantren Sindangsari, adalah cikal bakal pesantren al-Jawami yang dibangun pada tanggal 03 Mei 1931. Al-Jawami mengandung makna lengkap dan universal. Pendirian pesantren ini lebih banyak dikaitkan dengan para ulama terkemuka di Jawa Barat, hatta ketua MUI pertama Jawa Barat adalah pendiri pesantren Sindangsari ini, yakni K.H. Muhammad Sudjai’ (alm).
Jika ditilik dari proses awal pembentukan pesantren al-Jawami, maka keterlibatan para alim ulama begitu sangat signifikan. Gaung pesantren ini tentu saja dikarenakan kontribusi mereka, sebab pada masa itu sulit bagi lembaga pendidikan manapun untuk mengekspose diri dengan menggunakan cara-cara advertisement seperti dewasa ini. Hal itu menandakan bahwa perilaku atau tingkah laku yang diimplementasikan para ulama lebih menarik bagi para calon santri, atau bahkan ekpektasi untuk menjadi seperti mereka adalah asa yang tinggi di dalam diri calon santri.
Artinya pembentukan akhlak atau karakter memang dimulai dari figur atau pimpinan lembaga pendidikan. Secara tidak langsung mekanisme itu menjadi model kampanye paling efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang dianggap baik oleh agama, hukum dan adat. Efeknya, hasil dari proses itu akan mengendap dan menjadi khas dalam diri santri-santri tersebut. Maka, sangat wajar jika pada fase selanjutnya ada istilah kultus individu atau bahkan taqlid, karena mereka adalah figur “paripurna” dalam pemahaman santri.

6 Penutup

Beberapa masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, adalah;

1. Istilah pendidikan karakter, tidak dikenal secara konstitusional di Negara kita. Yang ada dalam konstruksi tujuan pendidikan nasional adalah berakhlak mulia (pasal 3 UU SPN No 20/2003). Artinya secara tidak langsung kita harus melacak dengan cermat dan komprehensif mengenai asal usul penggunaan istilah tersebut.
2. Secara ideologis, seperti dalam bukunya Doni Koesoema, istilah karakter nampaknya melupakan bagian Islam.¹⁸ Walaupun masih debatable dan interpretatif, akan tetapi dalam bukunya tersebut jelas menegaskan eksistensi pembentukan kepribadian, karakter, akhlak – atau apapun itu namanya- pada abad keemasan Islam, saat Rasulullah mensyiarkan Islam dengan jargonnya menyempurnakan keutamaan akhlak manusia.

Untuk itu perlu diperhatikan secara mendalam apa yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah) di Indonesia, Jawa Barat khususnya sehingga, diantaranya;

1. Niat untuk menggulirkan gagasan tersebut, adalah bagian dari ibadah kepada Allah Swt, bukan hanya kamufase survival semata. Hal ini perlu dielaborasi lebih tajam, sehingga dapat menjiwai seluk beluk yang berkaitan dengan pembinaan karakter (akhlak).
2. Pembentukan karakter dimulai dari keinginan besar para pendiri, founding father, pemimpin, lembaga tersebut untuk menghasilkan generasi terbaik pada masanya.
3. Program-program yang dilaksanakan sebagai turunan dari keinginan besar itu harus berbentuk perilaku yang lebih riil, tidak lebih banyak pada kajian-kajian semata, atau dialektika.

Figur menjadi entri point penting. Maka, disamping program yang jelas harus disiapkan generasi ke generasi yang memahami benar maksud dari pendidikan karakter (akhlak) yang akan digulirkan. Hal ini untuk meminimalisir deviasi dari tujuan awal yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag. 1999.
- Ali al-Khuli. *Dictionary of Education English Arabic*, Beirut: Dar al Ilmi li al-Malayin. 1981.
- Cowan, J. Milton. *A Dictionary of Modern –Written Arabic*, Beirut: Du Liban. 1974.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES. 1994.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasis dari *The Religion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya. 1983.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial; Studi tentang Peran Kyai dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M. 1987
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter*, PT. Grasindo; Jakarta. 2004.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina. 1997.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation. 2004.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia)*, Jakarta: Kencana. 2008.

- Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Wahab, Fuad. *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyyah fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, al- Daar al-Arobiyyah lil Kitab, 1993.
- Jurnal Media Pendidikan, Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
<http://www.kemendiknas.go.id>
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Djatnika, Rahmat. *Sistem Etika Islami*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hossein Nasr, Seyyed. *Menjelajah Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan Dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Alquran*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kauma, Fuad. *100 Panduan Hidup Muslim*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Muhammad, Afif. *Dari Teologi ke Ideologi*, Bandung: Pena Merah, 2004.
- Muhammad bin Shalih al-Munajjid, *Silsilah Amalan Hati*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Muhsin, *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam*, Jakarta: al-Qalam, 2004.
- Munawwir, A. W. *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Mustofa, *Akhlaq Tasawuf*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Muthahhari, Murtadha. *Falsafah Akhlak*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muthahhari, Murtadha. *Menjangkau Masa Depan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Muzadi, Hasyim. *Nadhlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos, 1999.
- Nata, Abudin. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nurul Iman, Farid, *Filsafat Akhlak*, Diktat Kuliah, ISID, Gontor, 2005.
- Poedjawiyatno, *Etika: Falsafat Tinglah Laku*, Cet. VII, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Sahal, Siti Aminah. *Diktat Kuliyah Akhlakq*. Ponorogo: IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1985.
- Shubhi, Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, Cet. I, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Soleiman, Abjan. *Ilmu Akhlak (Ilmu Etika)*. Jakarta: Dinas Rawatan Rohani Islam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1976.
- Tasmara, Toto. *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggungjawab, Profesional dan Berakhlak*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, Cet. VII, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Toffler, Alvin. *Gelombang Ketiga*. Jakarta: Pantja Simpati, 1990.
- Umary, Barmawi. *Materia Akhlak*. Solo: CV. Ramadhani, 1989.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunah yang Shahih*. Bogor: Pustaka at-Taqwa.